

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

BUMN, *Profil BUMN Indonesia*, Jakarta, 2017.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Hadjon, Philipus, M., *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 1997.

Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Leonora, Ghansam, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama, Sidoarjo, 2018

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Mulyadi, Kartini, Widjaya, Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mulyadi, Kartini, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001.

Mulyadi, Kartini, *Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Nating, Imran, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Nugroho, Adi, Susanti, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018.

Nurdin, Andriani, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012.

Prasetya, Rudhy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, 1995.

Radin, Max, *The Nature of Bankruptcy*, Foundation pres, New York, 1999.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta , 1991.

Rastuti, Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016.

Sjahdeini, Remy, Sutan, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2016

Soemitro, Rochmat, *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Eresco, Bandung, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, 1979.

Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2008.

Sukirno, Timur, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung, 2001.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang-Piutang*, Prenada media Group, Jakarta, 2013.

## **Majalah**

Hartono, Redjeki, Sri, "Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern", *Majalah Hukum Nasional*, No.2 Tahun 2002.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Penundaan Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

## **JURNAL**

Febryka, Luthvi 'Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya', Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.2, 2020.

Muhammad Alfi, Ety Susilowati, Siti Mahmudah "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No. 1, 2017.

Muryati, Tuti, Dewi, 'Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas', *Jurnal Dinamika SOSBUD*, Vol.17, No. 2, 2015.

Winda, Kade, Ayu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan', *Kerthasemaya*, Vol.02, No.1, 2014.

Yudhi, Gede, I, 'Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga', *Kertha Semaya*, Vol.04, No.02, 2016.

## INTERNET

Astri, Yunita, Astri, Maria S.H., "Peran OJK Sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi", *www.hukumonline.com*, 6 Desember 2016.

DPR, "berkasdpr", [berkas.dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id), diakses pada 22 Juni 2020.

Hasanah, Sovia, "Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi", *www.hukumonline.com*, 18 April 2020.

Idris, Muhammad, "Mengenal JS Saving Plan, Produk Jiwasraya yang Return Dua Kali Deposito", *www.monet.kompas.com*, 19 Desember 2019.

Pangestu, Wibi, "Ini Kisah Produk JS Plan yang Bikin Jiwasraya 'Hancur' ", *www.finansial.bisnis.com*, 23 Desember 2019.

Qurani, Hamalatul, Meski Pengadilan Nyatakan Pailit, "Aset BUMN Tak Akan Mudah Disita", *www.hukumonline.com*, 28 Desember 2018.

Rachmadsyah, Shanti, “Syarat Kepailitan”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 13 Juli 2010.

Rahma, Athika, “Kronologi Masalah Jiwasraya Versi OJK”, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 28 Desember 2019

Simanjuntak, Ricardo, “Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 6 Januari 2006.

Sovia, “Hukumnya Jika Perusahaan Asuransi Memberikan Data Pribadi Konsumen Tanpa Izin”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 1 Agustus 2018.

Zulfikri, Adherie, “Kenapa Harus Bailout di Jiwasraya ?, Akankah Rakyat Kembali di Paksa Sengsara?”, [www.tribunasia.com](http://www.tribunasia.com), 6 Maret 2020.